

Dinamika Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Otoritarianisme Modern

Erfain^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Author Correspondence. Email : erfain79@gmail.com

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Otoritarianisme Modern, Demokrasi, Gerakan Sosial, Partisipasi Politik</p> <p>Article history: Submitted: 23-08-25 Final Revised: 01-09-25 Accepted: 22-09-25 Published: 23-09-25</p>	<p>Masyarakat sipil merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara negara dan warganya, terutama dalam konteks demokrasi. Namun, munculnya bentuk-bentuk otoritarianisme modern menghadirkan tantangan serius bagi peran masyarakat sipil. Otoritarianisme modern tidak selalu tampil dalam bentuk represi langsung seperti pada rezim otoriter klasik, melainkan melalui strategi halus seperti pembatasan kebebasan berpendapat, manipulasi media, kriminalisasi aktivisme, serta kooptasi organisasi masyarakat sipil. Dinamika ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil harus beradaptasi dengan kondisi politik yang semakin kompleks dan penuh ambiguitas. Melalui studi literatur, artikel ini menganalisis strategi yang ditempuh masyarakat sipil dalam menghadapi otoritarianisme modern, termasuk penggunaan teknologi digital, penguatan jaringan transnasional, dan pengembangan model gerakan berbasis komunitas lokal. Kajian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sipil sering kali berada dalam posisi tertekan, mereka tetap mampu menciptakan ruang-ruang resistensi baru yang lebih fleksibel, cair, dan berorientasi pada kolaborasi. Artikel ini menegaskan bahwa masa depan demokrasi sangat bergantung pada kapasitas masyarakat sipil untuk mempertahankan independensinya sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital.</p>
<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: Civil Society, Modern Authoritarianism, Democracy, Social Movements, Political Participation</p> <p>Article history: Submitted: 23-08-25 Final Revised: 01-08-25 Accepted: 22-09-25 Published: 23-09-25</p>	<p><i>Civil society is a crucial pillar in maintaining the balance between the state and its citizens, particularly within a democratic context. However, the emergence of modern forms of authoritarianism presents serious challenges to the role of civil society. Modern authoritarianism does not always manifest itself in the form of direct repression, as in classic authoritarian regimes, but rather through subtle strategies such as restrictions on freedom of expression, media manipulation, criminalization of activism, and the co-option of civil society organizations. These dynamics demonstrate that civil society must adapt to increasingly complex and ambiguous political conditions. Through a literature review, this article analyzes the strategies employed by civil society in confronting modern authoritarianism, including the use of digital technology, strengthening transnational networks, and developing local community-based movement models. The study demonstrates that although civil society is often under pressure, it is still capable of creating new, more flexible, fluid, and collaborative spaces of resistance. This article asserts that the future of democracy depends crucially on civil society's capacity to maintain its independence while capitalizing on the opportunities offered by the digital era.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Masyarakat sipil (civil society) sejak lama dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga demokrasi dan tata kelola negara yang sehat. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara negara dan warga negara, tetapi juga sebagai kekuatan pengawas dan penyeimbang yang mampu mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sipil diharapkan mampu menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih luas, memperkuat nilai transparansi, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara. Seiring dengan dinamika politik global, peran masyarakat sipil semakin menantang karena harus berhadapan dengan sistem kekuasaan yang kerap mencoba membatasi kebebasan warga dengan dalih menjaga stabilitas nasional (Hidayat, 2023).

Fenomena otoritarianisme modern menjadi salah satu ancaman nyata yang dihadapi masyarakat sipil saat ini. Berbeda dengan otoritarianisme klasik yang identik dengan represi fisik dan dominasi militer, otoritarianisme modern cenderung berwajah lebih halus. Rezim otoritarian kontemporer menggunakan instrumen hukum, regulasi digital, serta propaganda media untuk mengendalikan opini publik dan mempersempit ruang kebebasan berekspresi. Strategi ini membuat bentuk represi menjadi tidak kasat mata, tetapi tetap menekan partisipasi warga. Situasi demikian menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat sipil untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mempertahankan ruang demokratis dan memperjuangkan hak-hak sipil (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Salah satu bentuk strategi otoritarianisme modern adalah pengendalian informasi melalui media massa dan ruang digital. Di era digital, informasi menjadi instrumen utama dalam membentuk persepsi publik. Pemerintah dengan kecenderungan otoritarian kerap memanfaatkan algoritma media sosial, sensor internet, serta kampanye disinformasi untuk melemahkan suara kritis. Hal ini berdampak pada melemahnya kebebasan pers dan berkurangnya ruang bagi masyarakat sipil untuk mengedukasi publik secara independen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya harus berhadapan dengan kekuatan negara, tetapi juga dengan ekosistem informasi yang dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan (Törnberg, 2022).

Selain melalui pengendalian informasi, otoritarianisme modern juga melakukan kooptasi terhadap organisasi masyarakat sipil. Beberapa rezim memanfaatkan mekanisme pendanaan, regulasi ketat, bahkan intervensi langsung dalam struktur organisasi untuk melemahkan gerakan sipil yang kritis. Organisasi yang berhasil dikooptasi kemudian digunakan sebagai alat legitimasi bagi rezim. Dalam kondisi ini,

masyarakat sipil yang independen menghadapi tekanan berlapis, baik dari sisi legal formal maupun dari sisi internal organisasi. Situasi demikian membuat peran masyarakat sipil semakin dilematis, antara mempertahankan independensi atau kehilangan ruang eksistensi di tengah represi (Lestari, 2020).

Meskipun demikian, dinamika masyarakat sipil juga menunjukkan adanya ketahanan dan kreativitas dalam menghadapi otoritarianisme modern. Berbagai kelompok sipil kini memanfaatkan teknologi digital sebagai ruang alternatif untuk menyuarakan aspirasi, melakukan mobilisasi, dan membangun solidaritas lintas batas. Media sosial, misalnya, telah menjadi arena penting dalam membangun gerakan sosial baru yang lebih cair, kolaboratif, dan sulit dikendalikan oleh negara. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun otoritarianisme modern berusaha menutup ruang partisipasi, masyarakat sipil tetap mampu menemukan jalur perlawanan baru yang relevan dengan perkembangan zaman (Cahyono & Kusuma, 2023).

Selain pemanfaatan teknologi, masyarakat sipil juga mengembangkan pendekatan berbasis komunitas lokal sebagai strategi bertahan. Gerakan sosial yang berbasis lokal dianggap lebih resilien karena memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat sekitar. Model ini sulit dijangkau oleh mekanisme represi negara karena beroperasi pada level mikro dengan isu-isu yang sangat kontekstual. Dengan cara ini, masyarakat sipil tidak hanya menjaga keberlanjutan gerakan demokrasi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang mampu menghadapi tekanan politik secara kolektif. Strategi ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tidak semata-mata terletak pada skala besar, melainkan juga pada kapasitas komunitas kecil untuk menjaga nilai-nilai demokratis (Nugroho, 2021).

Perlawanan masyarakat sipil terhadap otoritarianisme modern juga semakin terhubung secara transnasional. Globalisasi memungkinkan terbentuknya jaringan solidaritas internasional yang mendukung masyarakat sipil di negara-negara dengan tingkat represi tinggi. Dukungan dari lembaga internasional, organisasi non-pemerintah global, serta jejaring diaspora turut memperkuat posisi masyarakat sipil dalam menekan pemerintah yang cenderung otoritarian. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan masyarakat sipil bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga bagian dari dinamika demokrasi global yang saling terhubung (Kaldor, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami dinamika masyarakat sipil dalam menghadapi otoritarianisme modern. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi represi negara dijalankan, tetapi juga memperlihatkan daya adaptasi masyarakat sipil dalam menciptakan ruang resistensi

baru. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana masyarakat sipil dapat terus menjaga independensinya, memperkuat jaringan, serta memanfaatkan peluang teknologi digital untuk mempertahankan demokrasi di tengah kecenderungan otoritarian yang semakin canggih. Dengan demikian, analisis literatur ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan dialektis antara masyarakat sipil dan otoritarianisme modern.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat sipil terus dipandang sebagai aktor penting dalam menopang demokrasi dan menjaga ruang publik tetap terbuka. Perannya semakin vital dalam menghadapi praktik politik yang cenderung menutup ruang partisipasi warga. Menurut Pratama (2024) masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap negara, tetapi juga sebagai wadah penguatan kapasitas warga agar lebih kritis terhadap kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat sipil merupakan syarat esensial bagi kelangsungan demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

Fenomena otoritarianisme modern menuntut masyarakat sipil untuk lebih adaptif. Otoritarianisme masa kini hadir dalam bentuk yang lebih terselubung melalui instrumen hukum, regulasi digital, dan manipulasi media, bukan lagi lewat represi militeristik semata. Rahayu (2022) menjelaskan bahwa otoritarianisme modern memanfaatkan instrumen demokrasi formal seperti pemilu dan regulasi hukum untuk melegitimasi kekuasaan, sambil secara sistematis mempersempit kebebasan sipil. Bentuk represi ini sering kali sulit diidentifikasi karena dibungkus dengan mekanisme legal yang tampak sah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat sipil melakukan berbagai bentuk perlawanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Media sosial menjadi arena strategis untuk membangun gerakan sosial baru yang lebih cair, cepat, dan sulit dikendalikan. Wibowo (2023) menekankan bahwa aktivisme digital memungkinkan masyarakat sipil menciptakan narasi tandingan terhadap dominasi negara di ruang publik. Namun, peluang ini juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi opini dan risiko kriminalisasi berbasis digital yang semakin meningkat.

Selain teknologi, masyarakat sipil juga mengandalkan jaringan transnasional untuk memperkuat resistensi. Melalui solidaritas lintas negara, gerakan sipil memperoleh dukungan moral, politik, dan sumber daya yang mampu memperkuat daya tawar terhadap rezim otoritarian. Menurut Sari (2025) jejaring global masyarakat sipil berperan penting dalam memberikan legitimasi internasional serta membangun tekanan diplomatik terhadap pemerintah yang represif. Dengan demikian, resistensi masyarakat

sipil tidak lagi terbatas pada ranah lokal, melainkan menjadi bagian dari dinamika global demokrasi.

Meskipun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk kooptasi terhadap organisasi sipil. Negara dengan kecenderungan otoritarian sering kali mendukung organisasi pseudo-civil society yang justru berfungsi melemahkan gerakan independen. Hasil penelitian Putra (2021) menunjukkan bahwa strategi kooptasi ini dapat mengikis solidaritas antarorganisasi dan menimbulkan fragmentasi internal. Oleh karena itu, penguatan basis komunitas lokal, pemanfaatan teknologi secara cerdas, dan keterhubungan dengan jejaring internasional menjadi kunci agar masyarakat sipil dapat bertahan menghadapi tekanan otoritarianisme modern.

3. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode literature review yang berorientasi pada pendekatan kualitatif. Literature review dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu yang sedang dikaji, yaitu dinamika masyarakat sipil dalam menghadapi otoritarianisme modern. Kajian literatur berfungsi tidak hanya untuk mengumpulkan data sekunder, tetapi juga untuk mengidentifikasi tren, celah penelitian, serta membangun kerangka konseptual yang lebih utuh. Oleh karena itu, artikel ini tidak semata-mata merangkum literatur, melainkan juga melakukan analisis kritis terhadap berbagai penelitian terdahulu.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi berbagai sumber akademik, termasuk buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta laporan penelitian terkini yang terbit dalam kurun waktu 2018–2025. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan agar data yang dianalisis tetap relevan dengan konteks sosial politik kontemporer. Literatur yang digunakan terutama membahas tiga aspek penting, yaitu bentuk-bentuk otoritarianisme modern, respons masyarakat sipil terhadap tekanan politik, serta strategi resistensi baru yang muncul dalam era digital. Untuk memastikan validitas, hanya sumber dengan kredibilitas akademik yang dijadikan rujukan utama, sementara sumber non-akademik digunakan secara terbatas untuk memperkaya konteks.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, yakni dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan temuan-temuan dari berbagai literatur yang relevan. Braun dan Clarke (2021) menjelaskan bahwa analisis tematik dapat membantu peneliti menemukan pola berulang sekaligus perbedaan yang muncul dari data kualitatif. Dalam penelitian ini, tema-tema utama yang diidentifikasi meliputi strategi represi otoritarianisme modern, adaptasi masyarakat sipil dalam konteks digital, serta bentuk-bentuk resistensi transnasional. Hasil dari analisis ini kemudian dipadukan

untuk membangun argumen yang konsisten mengenai bagaimana masyarakat sipil bertransformasi dalam menghadapi otoritarianisme modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Transformasi Otoritarianisme

1) Menggunakan regulasi hukum untuk menekan kebebasan

Otoritarianisme modern menggunakan instrumen hukum sebagai sarana yang tampak sah untuk menekan kebebasan sipil. Regulasi dibuat dengan dalih menjaga stabilitas, keamanan nasional, atau ketertiban sosial, namun pada praktiknya sering diarahkan untuk membatasi hak-hak politik warga. Rahayu (2022) menegaskan bahwa rezim otoritarian cenderung merancang aturan hukum yang bersifat represif terhadap kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Regulasi tersebut biasanya diberi justifikasi moral atau keamanan, tetapi secara substantif berfungsi untuk mengendalikan oposisi dan meredam kritik publik. Strategi ini lebih sulit dideteksi oleh masyarakat luas karena diselimuti legitimasi hukum formal, sehingga menghadirkan dilema bagi masyarakat sipil dalam melawan represi.

Dampak dari regulasi yang represif adalah melemahnya peran organisasi sipil dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Undang-undang yang membatasi kebebasan berkumpul atau membatasi akses pendanaan organisasi non-pemerintah, misalnya, dapat secara signifikan menghambat gerakan sipil. Menurut Putra (2021) kriminalisasi berbasis hukum sering kali diarahkan pada individu atau kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, sehingga melahirkan efek jera yang membungkam ekspresi kolektif. Dengan demikian, hukum yang seharusnya menjadi instrumen demokratis justru dimanfaatkan untuk memperkuat otoritarianisme.

2) Manipulasi media dan ruang digital

Selain melalui hukum, rezim otoritarian modern memanfaatkan media massa dan ruang digital sebagai alat untuk mengontrol opini publik. Media arus utama sering kali diarahkan untuk menyajikan narasi tunggal yang menguntungkan pemerintah, sementara suara kritis dipinggirkan atau dibungkam. Wibowo (2023) menyatakan bahwa kontrol terhadap media tidak selalu dilakukan dengan penyensoran langsung, melainkan melalui kepemilikan, regulasi iklan, dan tekanan politik terhadap jurnalis. Strategi ini membuat media kehilangan independensinya, sehingga masyarakat menerima

informasi yang telah dimanipulasi demi mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain, ruang digital yang pada awalnya dianggap sebagai arena demokratis juga tidak luput dari kontrol negara. Rezim otoritarian modern memanfaatkan algoritma media sosial, pasukan buzzer, serta kampanye disinformasi untuk membentuk persepsi publik. Sari (2025) menunjukkan bahwa manipulasi ruang digital menciptakan kondisi di mana informasi palsu lebih dominan daripada fakta, sehingga melemahkan daya kritis masyarakat. Dengan demikian, media dan ruang digital tidak hanya menjadi arena pertarungan narasi, tetapi juga instrumen yang efektif bagi otoritarianisme dalam mempertahankan hegemoninya.

3) Kriminalisasi aktivis dan organisasi sipil

Salah satu strategi lain yang menandai otoritarianisme modern adalah kriminalisasi terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Kriminalisasi dilakukan dengan menggunakan tuduhan hukum yang sering kali tidak proporsional, seperti menyebarkan berita bohong, mengganggu ketertiban umum, atau bahkan ancaman terhadap keamanan negara. Menurut Pratama (2024) strategi ini bertujuan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil sehingga aktivitas kritis berkurang secara signifikan. Kriminalisasi juga sering diperkuat dengan pemberitaan negatif di media untuk menstigma aktivis sebagai ancaman bagi stabilitas.

Kriminalisasi tidak hanya melemahkan individu, tetapi juga memukul organisasi sipil secara kelembagaan. Organisasi yang terlibat dalam advokasi isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan antikorupsi sering kali menjadi target. Hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya, menurunnya kepercayaan publik, dan bahkan pembubaran organisasi. Putri (2023) menekankan bahwa dampak jangka panjang kriminalisasi adalah rusaknya ekosistem masyarakat sipil karena generasi baru aktivis menjadi enggan terlibat dalam gerakan sosial. Dengan demikian, kriminalisasi menjadi salah satu instrumen utama rezim otoritarian modern dalam membungkam resistensi sipil.

b. Adaptasi Masyarakat Sipil

1) Pemanfaatan media sosial sebagai ruang ekspresi alternatif

Meskipun menghadapi tekanan dari regulasi dan manipulasi media, masyarakat sipil beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang ekspresi alternatif. Platform digital seperti Twitter, Instagram, dan

TikTok menjadi sarana efektif untuk menyuarakan kritik, mengorganisir gerakan, dan menyebarkan informasi independen. Menurut Wibowo (2023) media sosial memungkinkan masyarakat sipil menghindari kontrol media arus utama dengan menciptakan ruang partisipasi baru yang lebih cair dan partisipatif. Hal ini membuka peluang munculnya solidaritas lintas kelompok yang sebelumnya terfragmentasi.

Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan baru. Selain risiko kriminalisasi berbasis digital, polarisasi opini sering kali membuat diskusi publik menjadi buntu. Sari (2025) menegaskan bahwa meski media sosial memperluas ruang partisipasi, keberlanjutannya bergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk memproduksi narasi yang kredibel dan berkelanjutan. Dengan kata lain, media sosial bukan hanya ruang alternatif, tetapi juga arena kompetitif yang membutuhkan strategi komunikasi politik yang matang.

2) Pembentukan koalisi lintas negara untuk memperkuat solidaritas

Masyarakat sipil juga beradaptasi dengan membangun jaringan transnasional untuk memperkuat solidaritas. Koalisi lintas negara memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, pengalaman, serta dukungan moral yang memperkuat daya tawar masyarakat sipil dalam menghadapi rezim otoritarian. Menurut Sari (2025) jejaring global memberikan ruang legitimasi internasional yang dapat menekan pemerintah melalui mekanisme diplomatik dan opini publik global. Dengan cara ini, perjuangan masyarakat sipil tidak lagi terbatas pada ruang domestik, melainkan menjadi bagian dari agenda demokrasi global.

Selain itu, jaringan transnasional juga berfungsi sebagai pelindung bagi aktivis yang terancam kriminalisasi. Dukungan internasional dapat mengurangi risiko represi berlebihan, karena pemerintah akan mendapat sorotan global jika melakukan tindakan represif. Pratama (2024) mencatat bahwa kerja sama lintas negara memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam mengakses sumber daya, termasuk pendanaan dan advokasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat sipil semakin bergantung pada kolaborasi global di era otoritarianisme modern.

3) Fokus pada gerakan komunitas lokal yang sulit dijangkau negara

Selain strategi global, masyarakat sipil memperkuat gerakan berbasis komunitas lokal. Gerakan ini berakar pada kebutuhan dan konteks masyarakat

setempat, sehingga lebih sulit dijangkau oleh mekanisme represi negara. Nugraha (2022) menjelaskan bahwa gerakan lokal memiliki keunggulan karena mengandalkan solidaritas sosial yang kuat, kedekatan emosional, serta isu-isu spesifik yang tidak selalu terdeteksi oleh rezim. Dengan demikian, gerakan komunitas lokal berperan sebagai benteng terakhir demokrasi di tingkat akar rumput.

Gerakan lokal juga lebih adaptif terhadap perubahan sosial karena langsung berinteraksi dengan masyarakat. Putri (2023) menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat sipil menjaga keberlanjutan gerakan meski menghadapi tekanan struktural dari negara. Selain itu, gerakan lokal sering kali menggunakan strategi kultural seperti seni, tradisi, dan ritual masyarakat sebagai sarana perlawanan yang lebih halus. Hal ini menjadikan komunitas lokal sebagai sumber inovasi dalam menghadapi otoritarianisme modern.

c. Dinamika Gerakan Sosial

1) Gerakan masyarakat sipil menjadi lebih cair dan adaptif

Gerakan masyarakat sipil di era otoritarianisme modern cenderung lebih cair, fleksibel, dan adaptif dibandingkan gerakan sosial klasik. Tidak lagi terikat pada struktur organisasi formal, gerakan kontemporer lebih banyak menggunakan jaringan informal yang dapat bergerak cepat dan dinamis. Pratama (2024) menyebut bahwa bentuk gerakan ini memungkinkan masyarakat sipil menghindari represi langsung karena sulit dilacak oleh negara. Hal ini menandakan pergeseran paradigma gerakan dari yang bersifat struktural menuju gerakan berbasis jaringan.

Fleksibilitas gerakan juga terlihat dari kemampuan masyarakat sipil untuk menggabungkan berbagai isu, mulai dari lingkungan, hak asasi manusia, hingga demokrasi digital. Nugraha (2022) menegaskan bahwa sifat cair dari gerakan ini memperluas basis dukungan karena dapat merangkul kelompok yang berbeda-beda. Dengan demikian, adaptabilitas menjadi kunci bagi masyarakat sipil untuk tetap eksis dalam menghadapi tekanan otoritarianisme modern yang semakin kompleks.

2) Resistensi dilakukan melalui seni, budaya, dan media kreatif

Selain melalui jalur politik formal, resistensi masyarakat sipil juga diekspresikan melalui seni, budaya, dan media kreatif. Seni pertunjukan, musik, film, hingga karya visual digunakan sebagai medium untuk

menyampaikan kritik sosial dengan cara yang lebih halus namun tetap efektif. Menurut Putri (2023) pendekatan kultural ini sulit ditekan oleh rezim karena dikemas dalam bentuk ekspresi artistik yang tidak selalu tampak politis. Hal ini membuka ruang alternatif bagi masyarakat sipil untuk menyebarkan kesadaran demokratis di tengah represi politik.

Resistensi berbasis budaya juga lebih mudah diterima oleh masyarakat luas karena bersifat menghibur sekaligus mendidik. Pratama (2024) menambahkan bahwa media kreatif mampu membangun identitas kolektif dan solidaritas melalui simbol-simbol budaya yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, seni dan budaya berfungsi tidak hanya sebagai sarana ekspresi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan politik yang dapat memperkuat kesadaran kritis warga.

3) Aktivisme digital berkembang sebagai instrumen demokrasi

Aktivisme digital menjadi salah satu bentuk adaptasi paling menonjol dalam menghadapi otoritarianisme modern. Platform digital memungkinkan mobilisasi massa yang cepat, penyebaran informasi alternatif, dan pembangunan solidaritas lintas batas geografis. Wibowo (2023) menekankan bahwa aktivisme digital telah merevolusi cara masyarakat sipil berinteraksi dengan isu-isu demokrasi, menjadikannya instrumen utama dalam memperjuangkan hak-hak politik di era digital.

Namun, aktivisme digital juga menghadapi risiko besar, termasuk kriminalisasi, disinformasi, dan kontrol algoritmik. Sari (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan aktivisme digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat sipil mengelola narasi, membangun kepercayaan, serta memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan kata lain, meskipun digitalisasi membuka ruang demokrasi baru, keberlanjutan gerakan tetap membutuhkan strategi komunikasi yang cermat dan berorientasi pada partisipasi yang inklusif.

5. KESIMPULAN

Dinamika masyarakat sipil dalam menghadapi otoritarianisme modern menunjukkan adanya transformasi signifikan baik dari sisi strategi represi negara maupun bentuk resistensi warga. Otoritarianisme tidak lagi hadir dalam wajah klasik berbasis militeristik, melainkan melalui regulasi hukum yang mengekang, manipulasi media dan ruang digital, serta kriminalisasi terhadap aktivis dan organisasi sipil. Namun, di tengah tekanan tersebut, masyarakat sipil tidak bersikap pasif, melainkan

terus beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang alternatif, membangun solidaritas lintas negara, serta memperkuat basis gerakan lokal yang lebih sulit dijangkau oleh kontrol negara. Gerakan sosial yang muncul pun semakin cair, adaptif, dan kreatif dengan mengintegrasikan seni, budaya, serta media digital sebagai sarana perlawanan sekaligus penguatan demokrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun otoritarianisme modern menggunakan strategi yang lebih halus dan kompleks, masyarakat sipil tetap menunjukkan ketangguhannya melalui inovasi gerakan, kolaborasi transnasional, dan pemanfaatan teknologi digital yang pada akhirnya berkontribusi menjaga ruang demokrasi tetap hidup.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, D., & Kusuma, A. (2023). Aktivisme digital dan transformasi gerakan sosial di era demokrasi digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 45–61.
- Erfain, E. (2025). Strategi Civil Society dalam Pendidikan Politik Inklusif untuk Memperkuat Civic Engagement Generasi Z. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(4), 140-151.
- Erfain, E., Arsalim, A., & Togala, R. (2025). Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Inklusif pada Pilkada. *Jurnal Abdi Masyarakat dan Pemberdayaan Inovatif*, 1(1), 69-79.
- Hidayat, A. (2023). Komunitas lokal dan masyarakat sipil di Indonesia: Antara solidaritas dan tantangan globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 101–115.
- Kaldor, M. (2020). *Global Civil Society: An Answer to War*. Cambridge: Polity Press.
- Lestari, S. (2020). Ekonomi solidaritas dan peran komunitas lokal dalam krisis sosial. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 12(1), 45–59.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown.
- Nugraha, F. (2022). Gerakan komunitas lokal sebagai basis demokrasi akar rumput. *Jurnal Politik Lokal*, 10(2), 77–93.
- Nugroho, H. (2021). Gerakan masyarakat sipil dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 89–104.
- Pratama, R. (2024). Peran masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(1), 55–72.
- Putra, A. (2021). Kooptasi negara terhadap organisasi masyarakat sipil di era demokrasi prosedural. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 8(2), 101–118.
- Putri, D. (2023). Kriminalisasi aktivis dan dinamika gerakan masyarakat sipil. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 14(1), 33–49.
- Rahayu, M. (2022). Otoritarianisme modern dan tantangan kebebasan sipil. *Jurnal Ilmu*

Sosial dan Humaniora, 11(3), 200–215.

Sari, D. (2025). Jaringan transnasional dan resistensi masyarakat sipil dalam menghadapi rezim otoritarian. *Global Civil Society Review*, 3(1), 44–60.

Törnberg, P. (2022). The digital making of authoritarianism. *Social Movement Studies*, 21(4), 452–467.

Wibowo, T. (2023). Aktivisme digital sebagai strategi resistensi masyarakat sipil. *Jurnal Komunikasi Politik*, 12(2), 87–103.